

**JURNAL**  
**HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI BAGI**  
**KOPERASI FUNGSIONAL PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA AKIBAT DARI**  
**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

**(Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum**  
**KPRI KAYA NIAGA MALANG)**

**ARTIKEL ILMIAH**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat**  
**Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaaan**  
**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**  
**PUTRI PERTIWI SANTOSO**  
**NIM. 0910110064**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**

**2013**

## ABSTRAK

PUTRI PERTIWI SANTOSO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG)* , Dr.Sihabudin,SH.MH, Herman Suryokumoro,SH.MS

Dalam penulisan ini, peneliti membahas hambatan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik indonesia akibat dari pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus proses pembubaran badan hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembubaran KPRI Karya Niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, apa hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang, dan upaya hukum apa yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah merubah status PNS dari Pegawai Negeri Pusat menjadi Pegawai Daerah di banyak instansi, perubahan status tersebut menjadikan para PNS tersebut dibawah kewenangan Walikota dalam Pembinaan dan Pendayagunaannya sehingga Walikota dapat melakukan Mutasi pada PNS tersebut sampai pada lintas dinas (eks departemen) akibatnya keanggotaan koperasi di beberapa dinas menjadi tersebar pada beberapa unit dinas yang pada akhirnya menjadikan koperasi tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya secara efektif, kondisi tersebut koperasi dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti Merger atau dibubarkan dan dalam kasus Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang ini pilihan akhirnya adalah pembubaran

Pada proses pembubaran KPRI Karya Niaga Malang mengalami hambatan, yaitu kurangnya KUORUM pada saat proses pembubaran dan dapat diambil kesimpulan bahwa KUORUM yang kurang dapat diisi dengan tetap mengundang anggota KPRI Karya Niaga Malang dilampiri dengan surat pernyataan bahwa pihak yang nantinya tidak dapat hadir dapat memberikan suara mereka pada surat pernyataan tersebut.

## ABSTRACT

PUTRI PERTIWI SANTOSO, Department of Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, January 2013, *The Dismissal Blockage for the Functional Koperasi Corporation of Koperasi Pegawai Republik Indonesia due to Regional Autonomy (Case Study on Dismissal Process of KPRI KARYA NIAGA Malang)*. Advisors: Dr.Sihabudin,SH.MH, Herman Suryokumoro,SH.MS.

In this study, the researcher discusses about the dismissal blockage for the functional *Koperasi* corporation of *Koperasi Pegawai Republik Indonesia* due to regional autonomy (case study on dismissal process of *KPRI Karya Niaga Malang*). Therefore, there is the need to have further review in determining whether the dismissal mechanism of *KPRI Karya Niaga Malang* has been in accordance with the Indonesian Government Regulation No. 17 of 1994, what kind of obstacles in the process of *KPRI Karya Niaga Malang* dismissal, and what legal remedies have been conducted in addressing the obstacle of *KPRI Karya Niaga Malang*'s dismissal.

Based on the result findings of the study, researcher found out that the dismissal mechanism of *KPRI Karya Niaga Malang* is not in accordance with Indonesian Government Regulation No. 17 of 1994, and the obstacles that arise during the process is the lack of *KUORUM* when the extraordinary meeting of members conducted.

Furthermore, in accordance with the process of *KPRI Karya Niaga Malang*'s dismissal, the lack of *KUORUM* number can be tricked by inviting the members of *KPRI Karya Niaga Malang* and attaching with a statement that the parties are unable to attend. Yet, they will still able to cast their ballots in the affidavit.

## PENDAHULUAN

Dasar pembentukan koperasi terkait dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “*perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan*”. *Asas kekeluargaan* ini sering dikaitkan dengan koperasi, sebab asas pelaksanaan usaha koperasi adalah kekeluargaan. Pengkoperasian itu sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang dan juga telah banyak mengalami penyempurnaan hingga yang terakhir ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Itu menunjukkan komitmen Pemerintah dengan koperasi, yaitu pemerintah telah menata regulasi pengkoperasian Indonesia dengan Undang-Undang awal hingga Undang-Undang akhir.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jenis koperasi berdasarkan usaha dan keanggotaannya. Jika dilihat dari berdasarkan usaha dapat dibagi menjadi Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Jika dilihat berdasarkan keanggotaannya yaitu Koperasi Fungsional dan Koperasi non Fungsional, Koperasi Fungsional disini seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi TNI, Koperasi Pasar (KOPPAS), Koperasi Unit Desa (KUD), dan Koperasi Sekolah.

Koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang beranggotakan pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Salah satu koperasi pegawai negeri di Malang adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang yang berdiri sejak tanggal 28 September 1985. Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang ini didirikan oleh para PNS dari DEPERINDAG yang pada saat itu wilayah kerja DEPERINDAG masih meliputi Kota, Kabupaten Malang, dan Batu.

Dalam perkembangannya sistem pemerintahan daerah di Indonesia sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya. Otonomi daerah Ini berdampak juga kepada DEPERINDAG (Departemen Perindustrian dan Perdagangan), yang sekarang menjadi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Otonomi daerah ini juga berdampak pada PNS dari setiap departemen termasuk PNS dari DEPERINDAG, mereka banyak yang di mutasi atau dipindah tugaskan ke berbagai Dinas. Dengan dipindah tugasannya PNS disetiap departemen termasuk PNS dari DEPERINDAG, mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan organisasi dan usaha pada koperasi pegawai negeri yang berada di lingkungan dinas PERINDAG yang bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, yang pada akhirnya berakibat pada pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang. Disini penulis tertarik untuk meneliti proses pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang yang sewaktu di dalam proses Rapat Anggota Luar Biasa mengalami kendala berkaitan dengan KUORUM yang kurang dari yang diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi KPRI Karya Niaga Malang, dan bagaimana proses penyelesaian terkait dengan aset dan hutang-hutang yang dimiliki oleh Koperasi KPRI Karya Niaga Malang.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme Pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang?
2. Apa hambatan dalam Pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang?
3. Upaya penyelesaian apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang dalam mengatasi hambatan dalam Pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, karena :

- a. Untuk meneliti tentang apakah mekanisme pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang.
- b. Untuk meneliti tentang hambatan dalam pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang.
- c. Untuk meneliti tentang upaya penyelesaian apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang dalam mengatasi hambatan dalam Pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang

Jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.<sup>1</sup> Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini tidak terlepas dari peranan pihak-pihak yang ada di dalam Dinas Koperasi Malang dan para anggota dari KPRI Karya Niaga Malang.

Data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian.  
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan :
  - a. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang.
  - b. Pejabat Dinas Koperasi Kota Malang
  - c. Pimpinan Dewan Koperasi Kota Malang
2. Data Sekunder adalah data yang mudah diolah dan di dapat melalui penilitian kepustakaan (*library research*).

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 65.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan :

- a. Studi kepustakaan atau *literature*, yaitu menggunakan berbagai buku atau literatur yang membantu dan menunjang dalam menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian dalam bidang pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik indonesia akibat dari pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Penelusuran internet, kliping, koran, yaitu berita-berita dan informasi yang terjadi di lingkungan secara nyata dalam masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi.
- c. Penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, yaitu berbagai peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi terutama yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik indonesia akibat dari pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Data primer, yaitu diperoleh dari wawancara, yaitu cara yang ditempuh untuk memperoleh data atau informan dengan melakukan pertanyaan lisan kepada narasumber untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>2</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini interview dilakukan kepada orang-orang yang mengerti permasalahan dan mereka yang ditunjuk oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang yang memahami langsung tentang proses jalannya kasus yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang yaitu Bapak Adde Sudyanto, SE selaku Ketua Domisioner Koperasi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 60

Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, Bapak Agus Sartono selaku Bendahara Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang, Bapak Dedy Darmawanto selaku Staff bagian Kelembagaan Dinas Koperasi Kota Malang.

2. Data sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan). Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan seluruh dari keseluruhan aktivitas penelitian.<sup>3</sup>

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dengan mencatat hasil objektif.

2. Reduksi Data

Dalam reduksi data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip ataupun data yang sama. Kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

3. Penyajian Data

Setelah data diperoleh selama mengerjakan penelitian kemudian akan diseleksi dan diorganisasikan yang selanjutnya akan disusun dan disajikan secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang telah diperoleh dilapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 114.



## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Koperasi Karya Niaga Malang Sebelum Otonomi Daerah**

Koperasi ini bernama Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Niaga dengan singkatan KPRI Karya Niaga Malang. Koperasi ini berada di Jalan Borobudur No.6 Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang, dengan keanggotaan Koperasi meliputi Pegawai Kantor Departemen Perdagangan Malang. Mereka yang diterima menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia beserta pensiunannya dalam Lingkungan Kantor Departemen Perdagangan Malang, dan anggota yang terdaftar sejumlah 64 orang. Koperasi Karya Niaga Malang ini berfungsi sebagai sarana (wahana) pembinaan, pembimbing dan penggerak insan koperasi dikalangan Pegawai Republik Indonesia dalam lingkungan/wilayah Kantor Departemen Perdagangan Malang, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang berlokasi di JL. Borobudur No 6 Blimbing Malang, keanggotaan koperasi adalah Pegawai Kantor Perdagangan Malang yang wilayah kerjanya meliputi Kota, Kabupaten Malang dan Batu. Badan hukum Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan No : 5945/BH/II/86 pada tanggal 10 Februari 1986 dan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No 724/PAD/KWK.13/III/97 pada tanggal 27 Maret 1997.

**TABEL I**

**Susunan Pengurus,Pengawas dan Anggota**

**Terakhir Koperasi**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	Adde Sudiyanto, SE	Ketua Domisioner
<b>2</b>	Hartati, SE	Sekretaris Domisioner
<b>3</b>	Rusti Subandini	Bendahara Domisioner
<b>4</b>	Drs. Wigit Ichtiarso	Pengawas
<b>5</b>	Drs. Adji Djatmiko	Pengawas
<b>6</b>	Drs. Bambang NLW	Anggota
<b>7</b>	Eo Dyah F, SH	Anggota
<b>8</b>	Mardiana, SE	Anggota
<b>9</b>	Guni Leginingtyas	Anggota
<b>10</b>	Ning Utami, SE	Anggota
<b>11</b>	Drs. Suwarso	Anggota
<b>12</b>	L.Suharso	Anggota
<b>13</b>	Hudiono	Anggota
<b>14</b>	Sugianto	Anggota
<b>15</b>	Siti Suryanik,SE	Anggota
<b>16</b>	Maknum	Anggota

17	Hari Siswanto	Anggota
18	Takat Triatmoko	Anggota
19	Arfiniati	Anggota
20	Dra. Atfiah El Zamzani	Anggota
21	Drs. Supoyono Guwat	Anggota
22	Drs Ayok Dwimlyo	Anggota
23	Agus Sungkono	Anggota
24	Drs. Sumartono	Anggota
25	Drs. Sukamto	Anggota
26	Sari Ratih	Anggota
27	Hadi Purnomo	Anggota
28	Nurhaida	Anggota
29	Erika Sinaga	Anggota
30	Drs. Hendro Sunyoto	Anggota
31	R. Agung HB, SE	Anggota
32	Sri Sukanti	Anggota
33	Anjar R	Anggota
34	Taryono	Anggota

**Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Panitia Pembubaran  
KPRI KARYA NIAGA Data Primer diolah, Maret 2013**

## **2. Sejarah Koperasi Karya Niaga Malang Sesudah otonomi Daerah**

Pada tanggal 28 September 1985 disepakati membentuk Koperasi Pegawai Negeri dengan nama Karya Niaga Malang yang berlokasi di JL.Borobudur No 6 Blimbing Malang, keanggotaan koperasi adalah Pegawai Kantor Perdagangan Malang yang wilayah kerjanya meliputi Kota, Kabupaten Malang dan Batu. Pada awalnya jumlah anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang sebanyak 64 orang dengan perkembangan wilayah maka Kantor Departemen Perdagangan pecah menjadi Kabupaten dan Kota Malang anggota Koperasi pun dipecah menjadi dua wilayah tersebut. Dalam era Otonomi Daerah maka Dinas Perdagangan digabung dengan Dinas Perindustrian beberapa tahun kemudian digabung lagi dengan dinas koperasi sementara dinas Koperasi sudah memiliki Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Bara sehingga terjadi dualisme kepemimpinan KPRI, berbagai opsi diajukan salah satunya adalah merger Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dengan Bara tidak membuahkan hasil. Anggota sebagai pegawai dimutasi ke berbagai Dinas dan Kelurahan yang ada di Kota Malang sehingga menyulitkan administrasi dan koordinasi KPRI, bahkan pengurusnya pun berada di luar Dinas Perindag.

Dengan kondisi yang seperti inilah maka Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang tidak bisa berkembang bahkan semakin surut dengan keluarnya separuh anggota dan tidak tertagihnya piutang anggota. Sudah dilakukan beberapa upaya dan opsi untuk mengangkat Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang tetapi hasilnya sia-sia bahkan untuk melaksanakan Rapat Anggota pun sudah sulit dilaksanakan. Dengan kondisi anggota KPRI Karya Niaga Malang saat ini anggota yang masih terdaftar sebanyak 34 orang sudah tidak aktif lagi hanya sisa 5 orang pengurus yang masih aktif dengan rincian sebagai berikut : 8 (delapan) orang pensiun, 5 (lima) orang di Pemerintah Kabupaten Malang dan 19 (Sembilan belas) orang tersebar di beberapa instansi di kota Malang sementara anggota yang tersisa di Dinas Perindagkop Kota Malang sebagai tempat domisili KPRI Karya Niaga Malang hanya 2 (dua) orang saja dan anggota yang sudah mengajukan berhenti sebagai anggota sebanyak 4 (empat) orang berada dalam daftar tunggu untuk direalisasikan.

Hutang anggota tak tertagih sejumlah RP 33.170.950,- sudah berbagai upaya pengurus menagih tanpa hasil sementara jumlah kewajiban koperasi yang masih harus di bayarkan kepada anggota sebesar RP 31.118.500,-. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada anggota pengurus berupaya mencairkan simpanan koperasi yang masih ada di KPRI Kota Malang yang sampai saat ini masih dibekukan sambil menunggu proses pembubaran koperasi.<sup>4</sup> Melihat kondisi yang seperti ini sudah sangat sulit untuk melanjutkan koperasi mengingat anggota yang sudah menyebar diberbagai instansi dan sudah banyak yang mengajukan pengunduran diri sebagai anggota, sementara untuk merekrut anggota baru di Dinas Perindag Kota Malang adalah pegawai yang telah menjadi anggota di KPRI lain maka rapat pengurus tanggal 20 september 2011 memutuskan untuk mengajukan pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang.

Dampak dari otonomi daerah ini sangat berpengaruh sekali pada Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah mengakibatkan dimutasinya para pegawai kesegala Dinas sehingga mengakibatkan Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang tidak bisa berkembang bahkan semakin surut dengan keluarnya separuh anggota dan tidak tertagihnya piutang anggota. Kegiatan pengkoprasian Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang juga mengalami kemacetan dan sudah tidak efektif lagi.

## **B. Mekanisme Pembubaran KPRI Karya Niaga Malang Berdasarkan Perundang-Undangan Perkoperasian dan AD/ART KPRI Karya Niaga Malang**

### **1. Mekanisme Pembubaran berdasarkan Perundang-Undangan Perkoperasian**

Pembubaran koperasi berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur di dalam BAB XIII tentang Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum. Berdasarkan pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, pembubaran koperasi dapat dilakukan

---

<sup>4</sup> Lihat Laporan Pengurus KPRI Karya Niaga dalam Forum Pembubaran Koperasi

berdasarkan :<sup>5</sup>

- a. Keputusan Rapat Anggota
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri

Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota diatur lebih lanjut dalam pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sampai dengan pasal 111 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 dan berdasarkan pasal 111 tersebut akan diatur lebih lanjut dalam aturan pemerintah, namun hingga saat ini aturan tersebut belum terbit. Disamping itu berdasarkan aturan penutup pada pasal 124 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, yaitu :

“Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”

Kasus pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, proses pembubarannya terjadi sebelum lahirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sehingga sejak awal pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pembubaran Koperasi diatur di dalam BAB X pasal 46 yang berbunyi, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan rapat anggota, atau
- b. Keputusan pemerintah

Dan pembubaran koperasi khusus oleh rapat anggota diatur pada pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012

## **b. Mekanisme berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi KPRI Karya Niaga**

Mekanisme Pembubaran Koperasi dilakukan dengan mengacu pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu di dalam BAB VI tentang Rapat Anggota pasal 12,13,14,15.

Proses Pembubaran Koperasi pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 masih berlaku selama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini seperti yang telah dijelaskan di dalam pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012.

Berdirinya Koperasi Karya Niaga berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 28 September 1985 disepakati membentuk Koperasi Pegawai dengan nama Karya Niaga yang berlokasi di JL. Borobudur No 6 Blimbing Malang, keanggotaan koperasi adalah pegawai kantor perdagangan malang yang wilayah kerjanya meliputi Kota, Kabupaten Malang, dan Batu.

Pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang ini menggunakan Rapat Anggota khusus. Tetapi pada saat Rapat Anggota Khusus itu berlangsung mereka mengalami kendala pada KUORUM yang tidak tercapai. Pada saat Rapat yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2011 yang hadir hanya 12 anggota dari 34 anggota yang telah diundang. Menurut pasal 15 ayat (3b) proses rapat anggota luar biasa yang membahas tentang pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dinyatakan batal dikarenakan kuorum yang tidak memenuhi dengan demikian rapat anggota khusus diatur dalam pasal 13 ayat (3) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Rapat Anggota Khusus diatur lebih lanjut dalam pasal 15 ayat 1 dan 2. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang kurang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang terutama pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang karena Kuorum yang tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam

KEPMENKOP UMKM nomor 19/KEP/M/III/2000 pada lampiran Sub II Pemberdayaan Kelembagaan, huruf A Kedudukan Hukum Koperasi, Angka 4 Pembubaran.

## **2. Hambatan Pembubaran KPRI Karya Niaga Malang**

Dilihat dari kasus Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang ini muncul hambatan dalam pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, yaitu berawal dari otonomi daerah yang berakibat pada terjadinya mutasi pada setiap dinas pemerintahan, dan ini juga terjadi pada DEPERINDAG.

Pada saat dilaksanakan proses pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang muncul hambatan yang kedua yaitu KUORUM yang kurang pada saat dilaksanakannya Rapat anggota Luar Biasa disebabkan karena anggota dari Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang Banyak yang tidak hadir karena banyak yang telah dimutasi karena posisi anggota sudah tersebar ke wilayah Malang Raya dan berada pada Dinas-Dinas yang berbeda-beda, Anggota sulit dapat hadir karena :

1. Faktor izin dari atasan
2. Faktor letak yang jauh dari kota malang
3. Faktor kemauan anggota tersebut.<sup>6</sup>

Selanjutnya hambatan yang ketiga yaitu banyaknya hutang anggota tak tertagih sejumlah Rp 33.170.950,- dan pembagian aset Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang kepada anggota, karena mengingat banyaknya anggota yang telah menyebar di berbagai instansi di sebabkan karena otonomi daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua KPRI Karya Niaga Malang, yaitu Bapak Adde Sudiyanto, SE

<sup>7</sup> Lihat Laporan Pengurus KPRI Karya Niaga dalam Forum Pembubaran Koperasi



### **3. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi UKM dan PKPRI Kota Malang dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pembubaran KPRI Karya Niaga Malang**

Upaya penyelesaian yang pertama yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi UKM dan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang adalah menyehatkan kembali dengan cara :

1. Merger dengan KPRI Bara
2. Memberi kesempatan menambah anggota baru di Dinas Perindag.<sup>8</sup>

Upaya penyelesaian yang kedua yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi UKM dan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang berkaitan dengan KOURUM yang kurang pada saat dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa adalah dikarenakan Rapat Anggota Luar Biasa ini dalam rangka pembubaran menyangkut eksistensi dari Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang sehingga pasal yang digunakan adalah Pasal 15 ayat (3b) dari Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang. Sehingga diperlukan upaya terobosan hukum digunakan sebagai pengganti ketidakhadiran para anggota dengan memberikan solusi kepada pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dengan tetap mengundang seluruh anggota dari Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dilampiri dengan surat pernyataan bahwa pihak yang nantinya tidak dapat hadir dapat memberikan suara mereka untuk setuju atau tidak setujunya di bubarkannya Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang pada surat pernyataan tersebut (surat dilampirkan).

Upaya penyelesaian yang ketiga yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi UKM dan Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang berkaitan dengan cara membagi aset dan menyelesaikan permasalahan hutang yaitu dengan membentuk tim penyelesai.

Hutang anggota tak tertagih sejumlah Rp 33.170.950,- kewajiban koperasi yang masih harus dibayarkan kepada anggota sebesar Rp 31.118.500,- aset yang dimiliki Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang hanya berupa pernyataan modal

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Koperasi UKM, yaitu Bapak Dedy Darmawanto

dan simpanan yang masih ada di Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) Kota Malang Sebesar Rp 22.623.714,-<sup>9</sup>

Upaya yang dilakukan Panitia Pembubaran adalah sebagai berikut :

1. Menghitung ulang kewajiban dan hak anggota yang masih bisa diperhitungkan maka diperoleh pengurangan dari Rp 1.118.500,- menjadi Rp 14.330.250,-
2. Menghitung aset yang masih ada berupa simpanan, modal penyertaan dan jasa lainnya sebesar Rp 22.623.714,-
3. Mengumumkan pembubaran Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang melalui media masa pada tanggal 1 November 2011 dan memberikan tenggang waktu 30 hari untuk menyelesaikan permasalahan bagi anggota dan masyarakat yang mengajukan keberatan-keberatan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada keberatan dari anggota dan masyarakat.
4. Membuat laporan pertanggung jawaban sebagai tugas akhir panitia.
5. Mengajukan surat permohonan pencabutan badan hukum Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang Kepada Bpk Walikota Malang melalui Bpk Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Dengan berakhirnya masa tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 november 2011 dan tidak ada sanggahan maupun keberatan dari anggota dan masyarakat maka panitia penyelesaian pembubaran koperasi telah selesai melaksanakan tugas yang diembannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sumber Data dari Tim Penyelesai/Pembubaran

<sup>10</sup> Lihat Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pembubaran KPRI Karya Niaga.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pembubaran KPRI Karya Niaga Malang kurang sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2012 pasal 124 dan KEPMENKOP UMKM nomor 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada bagian Sub II Pemberdayaan Kelembagaan, huruf A Kedudukan Hukum Koperasi, Angka 4 Pembubaran, bahwa pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota diatur dalam anggaran dasar Koperasi, karena pada saat Rapat Anggota Luar Biasa KUORUM tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 15 ayat (3b) Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang yaitu Rapat anggota khusus dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
2. Hambatan yang dialami adalah kurangnya KUORUM pada saat dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang disebabkan karena anggota dari Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang Banyak yang tidak hadir karena banyak yang telah dimutasi karena posisi anggota sudah tersebar ke wilayah Malang Raya dan berada pada Dinas-Dinas yang berbeda-beda, Anggota sulit dapat hadir karena :
  - a. Faktor izin dari atasan
  - b. Faktor letak yang jauh dari kota malang
  - c. Faktor kemauan anggota tersebut
3. Upaya hukum yang dilakukan berkaitan dengan KOURUM yang kurang pada saat dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa adalah dengan memberikan solusi kepada pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dengan tetap mengundang seluruh anggota dari Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dilampiri dengan surat pernyataan bahwa pihak yang nantinya tidak dapat hadir dapat memberikan suara mereka untuk setuju atau tidak setujunya di bubarkannya Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang pada surat

pernyataan tersebut. Sedangkan dengan pembagian aset dan pembayaran hutang Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang dibentuk Tim Penyelesai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian dengan menggunakan Studi Kasus Proses Pembubaran Badan hukum Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang adalah :

1. Bagi tempat penelitian
  - a. Seharusnya setiap instansi pasca otoda lebih menata lagi koperasinya dan apabila terdapat lebih dari 1 koperasi sebaiknya di merger menjadi 1 koperasi saja.
  - b. Untuk dinas-dinas di lingkungan Pemkot Kota Malang di merger menjadi 1 koperasi dan membentuk unit pelayanan usahanya di setiap dinas di buka unit-unit pelayanan usaha.

2. Bagi Pemerintah

Seharusnya pemerintah memberikan penataan ulang kedudukan kepada KPRI-KPRI di Dinas yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni : Bandung, 1991
- Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA : Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta : 1998
- Hendrojogi, *Koperasi Masalah Pengembangan Dan Pembinaannya*, Bagian Publikasi  
Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 1985
- Munkner Hans-H, *10 Kuliah Mengenal Hukum Koperasi*, Rekadesa : Jakarta, 2012
- Martawijaya Suradi, *Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Lembaga Penerbitan  
Dan Publikasi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya : Malang, 1992
- Nazir. Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia : Bogor, 2009
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Dian  
Rakyat, 1985
- R. Rido Ali, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,  
Koperasi, Yayasan, Wakaf*, P.T. Alumni. : Bandung, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia :  
Semarang, 1998
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia :  
Semarang, 1998
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka : Jakarta, 1998
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas Teori Dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta,  
2004

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Madya  
Malang Jawa Timur
- Anggaran Dasar Koperasi Republik Indonesia Karya Niaga (KPRI Karya Niaga)
- Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata),
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran  
Koperasi Oleh Pemerintah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoprasian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoprasian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

## **B. Internet**

Damang S.H, 2011, **Pengertian Otonomi Daerah,**

*<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-otonomi-daerah.html>, diakses tanggal 8 februari 2013*

Id.Shvoong, 2010, **Pengertian Koperasi Pegawai Negeri Sipil,**

*<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2063091-pengertian-koperasi-pegawai-negeri-sipil/>, diakses tanggal 8 februari 2013*

Labels, 2012, **Ringkasan Otonomi Daerah,** *<http://tugas-akuntansi.blogspot.com/2011/12/ringkasan-otonomi-daerah.html>, diakses tanggal 8 februari 2013*

Nawazir, 2012, **Pengertian dan Definisi Badan Hukum,** *<http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/badan-hukum.html>, diakses pada tanggal 8 februari 2013*

Tania Anjani, 2012, **Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia,** *<http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html>, diakses 8 februari 2013*